

DAMPAK PENDIRIAN *AGENTSCHAP VAN DE JAVASCHE BANK TE DJOKDJAKARTA* TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI YOGYAKARTA TAHUN 1880-1940

Oleh: Aziza Fajar Safitri, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, azizafs96@gmail.com

Abstrak

Pendirian *Agentschap Van De Javasche Bank Te Djokdjakarta* memberikan banyak pengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat di Yogyakarta. Dengan mulai diperkenalkannya sistem sewa tanah sedikit demi sedikit mata uang mulai dikenal dan dipergunakan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi Yogyakarta pada awal abad ke-19, *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* didirikan dan perkembangannya di Yogyakarta serta dampaknya bagi social masyarakat Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Tahap penelitian yang dilakukan pertama adalah heuristik, kedua adalah kritik sumber, ketiga interpretasi, keempat historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berdirinya *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* tahun 1880-1940 menjadikan Yogyakarta sebagai suatu wilayah yang mumpuni dalam hal fasilitas dan perkembangan ekonomi.

Kata kunci: *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta, Sosial Ekonomi, Yogyakarta.*

Abstract

The establishment of *Agentschap Van De Javasche Bank Te Djokdjakarta* has many indirect effects on economic growth and social development in Yogyakarta. The currency began to be known and used in the economic activities of the community by the time land rent system is introduced. The main of research to examine the socio-economic development of Yogyakarta in the early 19th century, *Agentschap Van De Javsche Bank te Djokdjakarta* was established and its impact on the socio-economic Yogyakarta. This research using critical historical methods. The first stage of this research is heuristics, the second is source criticism, the third interpretation, the fourth historiography or historical writing. The results of this research indicate that by the establishment of *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* in 1880-1940 made Yogyakarta as a region that is qualified in terms of facilities and economic development.

Key word: *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta, Socio-Economic, Yogyakarta.*

I. PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-19, di Eropa Barat termasuk Negeri Belanda mulai berlangsung Revolusi Industri yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan di bidang industri. Berbagai barang hasil industri khususnya dari Negeri Belanda, saat itu sulit untuk dipasarkan ke Hindia Belanda karena berbagai faktor. Salah satunya pada saat itu di Hindia Belanda sistem barter dalam dunia perdagangan masih sangat kental meskipun uang sudah dikenal. Hal ini menyebabkan pihak Belanda harus melakukan ekspor perak dengan berbagai hasil bumi.

Dengan semakin banyaknya hasil industri terutama logam yang dijual-belian secara barter dengan hasil bumi Hindia Belanda dan berbagai kasus penyimpangan moneter Pemerintah Belanda mengalami defisit. Selain defisit kondisi keuangan juga carut marut. Untuk memperbaiki hal tersebut dibutuhkan suatu lembaga perbankan untuk memulihkan keuangan dan sumber permodalan bagi kegiatan industri perdagangan di Hindia Belanda. Atas berbagai usulan dan rapat maka pada tanggal 24 Januari 1828 didirikan sebuah bank yang diberi nama *De Javasche Bank* yang saat itu telah diberi hak *octroi* pada tahun 1827 sebagai bank sirkulasi.

De Javasche Bank berdiri atas tindak lanjut dari gagasan 1816¹ tentang pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda. Pada 29 Desember 1826 Raja Willem I mengirimkan surat kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk segera berunding dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di Jawa berdasarkan *octroi*, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah dengan jangka waktu modal saat itu *f* 4 juta yang terbagi dalam 8.000 lembar saham, masing-masing bernilai *f* 500.² Nilai itu harus dipenuhi dalam bentuk emas dan perak. Modal disetor untuk tahap pertama diisyaratkan sebesar 50

persen, yaitu *f* 2 juta, dan apabila modal telah disetor telah tercapai 25 persen, yaitu sekitar *f* 1 juta, bank dapat dinyatakan berdiri dan memulai usaha.

Karena itu pemerintah segera melemparkan saham bank ke pasaran, terutama kepada para pengusaha atau pejabat pemerintah. Meskipun awalnya tidak berjalan dengan lancar, pada 16 Januari 1828 pihak bank telah melaporkan kepada pemerintah bahwa telah terjual 2.019 lembar saham atau senilai *f* 1.009.500 yang berarti saat itu telah tercapai 25 persen dari modal keseluruhan.³ Beberapa pemilik saham *De Javasche Bank* saat itu antara lain: pemerintah Hindia Belanda dengan 1.000 saham, *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM)⁴ 300 saham, serta beberapa pejabat pemerintah, termasuk Komisaris Jendral Du Bus de Gisignies, juga turut membeli antara 10 dan 50 lembar saham. Pembentukan *De Javasche Bank* dilakukan oleh Komisaris Jendral Hindia Belanda yang bernama Leonard Pierre Joseph Burgraaf Du Bus de Gisignies. Fungsi dan peranan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi berkembang secara gradual berdasarkan *octroi* yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.⁵

Menjelang abad ke-20 di seluruh Hindia Belanda, *De Javasche Bank* baru mempunyai 7 kantor cabang, yaitu Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), Yogyakarta (1879). Pembukaan kantor cabang ketiga dari *De Javasche Bank* cabang Padang pada 29 Agustus 1864 membuat pembukaan kantor cabang di daerah-daerah lainnya di Nusantara semakin ditingkatkan. 21 Desember 1864 kemudian *De Javasche Bank* Makassar resmi dibuka, pembukaan kantor cabang Padang dan Makassar ini

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Anne Booth dan William J-O Malley. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES: NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij adalah sebuah perusahaan dagang milik orang Belanda. Perusahaan ini pada awalnya bergerak di bidang perniagaan, industri, pertanian, pemancingan ikan, pelayaran nasional serta memperbanyak perhubungan dagang Nederland. Barulah berdasarkan perubahan peraturan dasarnya pada tahun 1874, kemudian dimasukkan pekerjaan bank dalam daftar usahannya, tetapi pekerjaan bank ini baru dikerjakan dalam tahun 1883; Aidil. 1997. "Latar Belakang dan Kondisi Awal *De Javasche Bank* Cabang Padang (Abad XIX Sampai Awal Abad XX)". Lihat pula Ketut Rinjin. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) mengungkap hal yang sama.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹ Muncul gagasan untuk pendirian bank sirkulasi di Hindia Belanda yang terjadi saat upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris di Negeri Belanda, gagasan pendirian bank sirkulasi untuk wilayah koloni ini kemudian menjadi pembicaraan hangat antara pejabat Belanda. Pada saat yang sama di Hindia Belanda muncul desakan kuat dari kalangan para pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka dan memfasilitasi pendanaan serta perdagangan luar negeri dalam Erwin Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 12.

² Adjie Mulawarman, *Kilas Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta*, (Yogyakarta: Bank Indonesia Yogyakarta, TT) hlm. 3

adalah pembukaan kantor cabang pertama di luar Jawa.

Pembukaan kantor cabang Yogyakarta sendiri muncul akibat dari perjalanan dinas yang dilakukan ke beberapa wilayah oleh Presiden *De Javasche Bank* yang saat itu dijabat oleh N.P van den Berg yang dilakukan pada bulan Agustus hingga September 1878. Pada saat melakukan perjalanan ini kemudian muncul gagasan untuk mendirikan sebuah Kantor Cabang Yogyakarta yang muncul dari berbagai pihak termasuk saat itu perusahaan-perusahaan Belanda seperti *Firma Dorrepal dan Co*, yang mempunyai kepentingan usaha di Yogyakarta. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada Mr. N.P van den Berg yang saat itu merupakan President *De Javasche Bank* ketujuh.

II. METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis dokumen, rekaman dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta yang kemudian akan menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Metode merupakan cara untuk mengerjakan sesuatu dalam sistem yang terencana dan teratur. Metode sejarah mengenalkan cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Dalam setiap penelitian pasti mempunyai metode tersendiri sebagai prosedur untuk menganalisis secara kritis dari objek penelitian. Menurut pengertiannya, metode sejarah adalah proses menganalisis dan menguji secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau.⁶ Metode sejarah juga akan mempermudah para sejarawan untuk menulis karya sejarah karena analisa yang kritis.

1.Heuristik

Heuristik adalah kemampuan dalam menentukan dan menghimpun data-data atau sumber yang diperlukan dalam sebuah penulisan karya sejarah. Dalam tahap ini peneliti harus mencari dan menemukan dokumen yang sekiranya relevan dengan apa yang akan peneliti tulis. Seorang sejarawan sebelum melakukan penelitian, mereka terlebih dahulu harus mencari sumber sejarah untuk dikaji. Kajian mengenai sumber sejarah inilah yang merupakan ilmu-ilmu tersendiri yang disebut dengan heuristik. Pengumpulan sumber primer dilakukan di Jakarta, Surabaya, serta Yogyakarta.

2.Verifikasi

Verifikasi sering disebut sebagai kritik sumber adalah tahap kedua setelah sumber sejarah didapatkan. Hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari fakta yang sudah ada. Seorang sejarawan perlu suatu kepekaan yang tajam dalam menguji sumber sejarah agar didapatkan data sejarah

yang benar-benar teruji. Dalam tahap verifikasi obyektivitas seorang sejarah juga sangat diperlukan. Seorang sejarawan dalam menulis sebuah karya sejarah diharapkan menulis secara obyektif.

3.Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai penafsiran dari fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Interpretasi digunakan untuk mencari berbagai hal yang saling berkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain sehingga menjadi sebuah rangkain fakta yang logis dan mempunyai makna. Keterkaitan antara fakta sejarah tersebut yang nantinya akan memudahkan peneliti pada tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi.

4.Historiografi

Historiografi adalah penyampaian sintesis yang diperoleh melalui penelitian, setelah melakukan analisis data dan kemudian akan dihasilkan sintesis hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis sejarah. Historiografi adalah tahapan terakhir sejarawan dalam melakukan penelitiannya. Adapun hasil akhir adalah menghasilkan sintesis dari seluruh penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut dengan historiografi.

III. PEMBAHASAN

A. KONDISI YOGYAKARTA AWAL ABAD KE-19

1. Kondisi Geografis & Demografis

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang berdasarkan wilayah Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Selain itu ditambah dengan bekas wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran yang sebelumnya merupakan *enklave*⁷ di Yogyakarta. Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah lain yang berstatus kabupaten. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi; Kabupaten Wonogiri dibagian tenggara; Kabupaten Klaten di bagian timur laut; Kabupaten Magelang di bagian barat laut; Kabupaten Purworejo di bagian barat.

Kasultanan Yogyakarta pada mulanya memiliki daerah kekuasaan yang luas, yaitu meliputi Banyumas, Kedu, Mojokerto, Bojonegoro, Madiun, Grobogan dan Blora. Sesudah Perang Diponegoro berakhir kemudian ditandatangani perjanjian pada

⁷ *Enklave* adalah negara atau bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah negara lain atau disebutkan pula daerah (budaya) yang terdapat dalam suatu wilayah budaya lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disusun oleh Tim Penyusun Pusat Kamus, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 37.

⁶ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 64.

tahun 1831 antara Sri Sultan Hamengkubuwono VI dengan pemerintah Hindia Belanda yang diperintah langsung oleh Belanda. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda diharuskan membayar ganti rugi tahunan berupa uang kepada Sultan.⁸

Dengan adanya perjanjian pada tahun 1831 tersebut, wilayah Kasultanan Yogyakarta semakin sempit, sehingga diadakanlah perubahan kekuasaan Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1903 dibagi menjadi beberapa *afdeeling* oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu pertama, *afdeeling* Mataram di bawah asisten residen dengan ibukota Yogyakarta yang terdiri atas Yogyakarta, Sleman, Kalasan, dan tanah-tanah susuhunan, Pasar Gedhe, Imogiri dan Bantul. Daerah Mataram, yaitu kekuasaan di tengah negara yang terbentang antara sungai progo di sebelah barat dan sungai Opak di sebelah timur. Daerah ini digunakan sebagai tempat tinggal patuh, sehingga daerah Mataram ini dapat disamakan dengan wilayah *Negara Agung*.

Kedua *Afdeeling* Kulon Progo di bawah asisten residen dengan ibukota Wates yang terdiri atas kabupaten Nanggulan, Kalibawang, dan Sentolo. Wates merupakan tanah Sultan sedangkan kabupaten Adikarto milik Pakulaman. Wilayah Kulon Progo adalah daerah di sebelah barat kali progo dan di sebelah timur daerah Bagelen. Daerah ini menjadi bagian dari wilayah Sultan yang khusus, hanya putra mahkota yang tanah *lungguh*-nya terletak di daerah ini, oleh karena itu daerah ini disebut *pengasih*.

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Yogyakarta pada Masa Kolonial.

Menjelang awal abad ke-19 pertumbuhan penduduk di kota Yogyakarta mulai meningkat. Terdapat berbagai etnis, kelompok pribumi menduduki jumlah terbesar, terdapat pula kelompok orang Eropa dan Timur Asing. Sebagian besar orang Eropa adalah para pejabat Pemerintahan Hindia Belanda, pengusaha perkebunan dan pengusaha lainnya. Orang Timur Asing yang ada di wilayah kota Yogyakarta sebagian besar berprofesi sebagai pedagang.

Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari politik kolonial pada masa itu. Sebagaimana diketahui dengan dibubarkannya VOC pada tahun 1799 dan mulai berkuasanya Pemerintah Hindia Belanda, maka pada saat itu mulai berlaku perubahan mendasar di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi itu misalnya dalam sistem nilai, struktur masyarakat, relasi interpersonal dan ekonomi.⁹ Khususnya dalam masalah ekonomi, maka pemerintah Hindia Belanda pada awal abad 19 itu tetap berpegang pada politik eksploitasi, yaitu

⁸ Depdikbud, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1977), hlm. 31.

⁹ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 303-305.

berusaha mengeruk kekayaan daerah jajahan sedalam-dalamnya. Bahkan Menteri Jajahan pada waktu itu mengibaratkan “Java sebagai gabus tempat Niderland berapung”. Maksudnya Jawa merupakan sumber kehidupan bagi Niderland.¹⁰

Sejalan dengan hal itu kepentingan pokok dari pemerintahan kolonial adalah mengadakan eksploitasi daerah jajahan untuk memberikan hasil dan keuntungan pada negeri induk. Namun pada kenyataannya pelaksanaannya dalam kurun waktu dari tahun 1800 sampai tahun 1816 ternyata tetap meneruskan cara lama yang dilakukan oleh VOC. Dengan demikian sistem dagang dengan pengerahan paksa serta *Contingenten*¹¹ seperti yang dijalankan oleh VOC dilanjutkan.

Sebagaimana diketahui sekitar awal abad ke-19 kehidupan ekonomi di Jawa termasuk pula Yogyakarta, terdapat suatu kehidupan ekonomi desa yang masih sederhana di mana penduduk tani menghasilkan barang untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya sendiri.¹² Adapun alat organisasi kehidupan ekonomi yang terdiri atas hubungan kekuasaan dan ketaatan yang timbul dari kekuasaan raja-raja dan bupati-bupati juga pejabat-pejabat yang termasuk dalam lingkungan kerajaan serta kabupaten atau setidak tidaknya yang berada lebih tinggi daripada lingkungan desa. Hubungan kekuasaan dan ketaatan yang demikian itu disebut ikatan feodal.¹³ Berbagai modal asing juga mulai muncul dan masuk pada dekade 1850-1860. Masuknya berbagai modal asing dibarengi dengan tekanan dari pihak swasta kepada Pemerintah Kolonial agar membuka wilayahnya. Akhirnya Pemerintah Kolonial mengizinkan pihak Eropa untuk menanamkan modalnya di *Vorstenlanden* meski orang Tionghoa dilarang untuk menyewa tanah disana. Perubahan dengan segera terjadi di *Vorstenlanden*.

Pada tahun 1855 di wilayah Surakarta sebanyak 33.000 bau lahan disewa oleh pengusaha perkebunan Eropa. Jumlah tanah yang disewa tahun Pada tahun 1860 jumlah lahan yang disewa menjadi

¹⁰ Sirashi Takashi, *Zaman Bergerak, Radikalisme rakyat di Jawa*, (Jakarta: Grafiti, 1912), hlm. 52.

¹¹ *Contingenten* adalah kewajiban menyerahkan pajak berupa hasil bumi kepada pemerintah Belanda guna menjaga uang kas pemerintah Hindia Belanda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹² Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogaykarta*, (Yogyakarta : UGM Press, 1984), hlm. 14.

¹³ Margana S, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 32.

160.000 bau, dan kemudian mencapai 200.000 bau di tahun 1864.¹⁴

Tabel 2
Tanah yang disewakan di Yogyakarta dan Solo
pada tahun 1862 – 1920 (dalam bau)

Tahun	Solo	Yogyakarta
1862	46.000
1864	200.000
1875	248.000	78.000
1880	301.000	88.000
1890	259.000	93.000
1895	273.000	93.000
1900	246.000	89.000
1905	245.000	85.000
1910	235.000	95.000
1915	214.000	97.000
1920	183.000	102.000

Sumber: Ferry Warjiyo, *Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo* (Surakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, TT), hlm. 34.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tanah yang disewakan di Surakarta dan Yogyakarta sangat berbeda jauh. Hal ini karena Surakarta terlebih dahulu menjadi wilayah dengan ekonomi yang lebih strategis dengan dekatnya Surakarta dan Semarang selain itu, Surakarta sudah dibangun lembaga penyedia permodalan milik Pemerintah Kolonial pada tahun 1867. Pada tahun 1870 kemudian muncul sebuah undang-undang yang dinamakan sebagai *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria). Undang-undang ini pada pokoknya menetapkan tentang prinsip dasar dari Politik tanah. Hal penting dari Undang-undang ini adalah bahwa para pengusaha dapat menyewa tanah dari pemerintah untuk masa 75 tahun. Disamping itu penduduk pribumi dijamin hak-hak miliknya atas tanah menurut hukum adat dan

ditetapkan pula bahwa tanah yang bukan milik perseorangan penduduk merupakan tanah milik negara (pemerintah atau tanah domein).

Meski para pemilik perkebunan itu telah menggantikan kedudukan para elite lokal sebagai *patron*, ikatan sosial dan ekonomi antara *sikep* atau buruh tani tidak hilang begitu saja. Selain itu, biarpun jumlah lahan yang disewa para investor swasta terus bertambah dari tahun ke tahun, masih terdapat jumlah *sikep* yang besar. Hal ini menggambarkan masih banyaknya hak penguasaan atas tanah yang cukup besar pada para raja, adipati, dan kerabatnya, paling tidak sampai tahun 1870. Sementara jumlah buruh tani yang tidak menguasai tanah menjadi semakin besar dan monetisasi menjadi ciri penting dalam ekonomi desa. Namun tetap saja perkembangan penyewaan tanah di wilayah Yogyakarta lebih lambat jika dibandingkan dengan Solo.

3. Monetisasi di Yogyakarta

Pada awal abad ke-19 model petani di Yogyakarta masih bersifat tradisional dengan sistem ekonomi desa yang sangat sederhana. Proses pemenuhan kebutuhan masih dilakukan dengan sistem saling bertukar hasil pertanian begitu pula untuk hal jasa mereka masih menggunakan metode sederhana. Disamping pertanian dengan cara sederhana di daerah Yogyakarta telah sejak lama bergulir perdagangan hal ini membuat mata uang telah dipakai meskipun masih dalam kalangan terbatas.¹⁵ Dengan berlangsungnya praktek sewa tanah di Yogyakarta membuat sistem pengenalan mata uang semakin meningkat hal ini dikarenakan lalu lintas ekonomi semakin ramai dengan adanya sewa tanah di wilayah Yogyakarta.

Dari sewa tanah para pengusaha akan mempekerjakan para buruh untuk mengelola lahannya. Dari sewa tanah didapatkan upah kerja untuk para buruh dan upah sewa dari sewa tanah kepada pemilik tanah meskipun jumlah yang ada masih sangat kecil hal ini tetap membawa dampak yang cukup besar untuk peredaran uang di wilayah Yogyakarta. Peredaran uang semakin meningkat tajam akibat dari pembayaran secara tunai terhadap para buruh pekerja harian bersama-sama dengan kewajiban-kewajiban melakukan kerja bakti penanaman, bekerja di perusahaan-perusahaan pertanian dan mengangkut barang ke pesisir. Selain itu uang juga masuk melalui upah sewa yang dibayarkan kepada orang-orang Jawa yang memegang tanah lungguh dan juga dalam bentuk kompensasi ekstra yang dibayarkan kepada para pemegang tanah lungguh atas jasa layanan yang seharusnya adalah hak mereka. Selain hal ini raja juga mendapat uang atas pajak stempel untuk tiap

¹⁴ Purnawan Basundoro, *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota di Indonesia*, (Yogyakarta : Indonesia Acros Olders , 2010),. hlm. 22.

¹⁵ Tim Penulis LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*,(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 33.

kontrak sewa yang disetujui. Pada tahun 1830-1870 terjadi banjir mata uang logam tembaga di daerah Jawa akibat dari proses sewa tanah. Diketahui dari berbagai perhitungan pers kolonial tentang pendapatan moneter per keluarga per tahun di Yogyakarta adalah f 31,50 pertahun.¹⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa upah sebesar 20 duit perhari dengan total 157,5 hingga 176 hari kerja dilakukan per tahunnya per keluarga. Hal ini telah diindikasikan sebelumnya bahwa seorang kuli berpenghasilan sekitar 20 duit. Sebelum tahun 1846 satu duit setara dengan seperdua puluh gulden perak perhari. Namun, tidak ada angka-angka yang pasti mengenai jumlah penduduk yang melakukan buruh harian maupun buruh yang disewa secara tetap. Di Yogyakarta angka untuk buruh tetap adalah 25.891 dan buruh tidak tetap atau harian sebesar 3.470. Dengan rata-rata 150 hari per tahun berarti pengusaha sudah membayar mereka 0,8 juta per tahun.

Pada tahun 1891 pada periode liberal saat kerja paksa dihapuskan semakin banyak perusahaan swasta yang mempunyai perkebunan ataupun menyewa lahan di wilayah Yogyakarta yang membutuhkan tenaga lepas untuk digunakan tenaganya. Para pekerja bebas ini akan diberikan upah dimuka yang kemudian akan dipotong di akhir terdapat juga buruh dengan model harian. Hal ini mengakibatkan semakin beredarnya uang di Yogyakarta. Dengan adanya monetisasi atau sistem penggunaan mata uang merubah gaya hidup masyarakat desa yang awalnya menggunakan metode pertanian sederhana dengan ikatan komunal yang kuat, kemudian bergeser menjadi masyarakat dengan sistem kontrak dan pandangan ekonomi yang telah bebas.¹⁷

B. BERDIRINYA AGENTSCHAP VAN DE JAVASCHE BANK TE DJOKDJAKARTA 1879.

1. Berdirinya De Javasche Bank

Ramainya perdagangan di Asia terutama pada awal abad ke-15 telah menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan ekspedisi perdagangan ke Nusantara. Dampak dari ekspedisi ini adalah semakin beragamnya jenis mata uang yang beredar di Nusantara yang digunakan sebagai alat pembayaran. Pada abad tersebut bangsa-bangsa Eropa berupaya

untuk memperluas wilayah penjajahan di berbagai belahan dunia., termasuk di Asia khususnya Nusantara. Spanyol dan Portugis adalah pelopor penjelajahan yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani (1453). Seiring dengan berlangsungnya revolusi industri di Eropa kegiatan ekspor bahan baku baik dari wilayah Asia maupun Amerika berkembang pesat yang akhirnya memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal bakal lembaga perbankan modern, antara lain seperti *Bank van Leening* di Belanda, *Bank of England* (1773), *Riskbank* (1809), serta *Bank of France* (1800) .

Pada tahun 1602 di Belanda berdiri suatu perusahaan dagang bernama *Vereenigde Indische Company* (VOC) dengan tujuan untuk memudahkan monopoli perdagangan dan menghindari persaingan antara sesama perusahaan Belanda. Pada masa VOC ini, didirikanlah sebuah lembaga perbankan pertama di Nusantara. Ketika dipimpin oleh Gubernur Jendral van Imhoff, *Bataviasche Bank van Leening* atau biasa disebut *Bank van Leening*, berdiri tanggal 20 Agustus 1746. Pada periode tersebut, tugas dari lembaga perbankan lebih mirip dengan rumah pegadaian yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang-barang berupa emas, perak, batu permata, dan atau barang-barang dagangan yang laku di pasaran pada masa itu. Dalam perkembangannya, Bank Van Leening mengalami kesulitan mengembangkan modalnya dikarenakan hampir seluruh pegawai VOC melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan bank. Misalnya, para pegawai bank tersebut sering meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengenakan bunga yang tinggi. Menghadapi kenyataan bahwa *Bank van Leening* tidak berjalan dengan semestinya, VOC kemudian mendirikan satu lembaga baru yaitu Bank Courant.

Rencana pendirian *Bank Courant* dilakukan tanpa terlebih dahulu menutup *Bank van Leening*, yang kemudian *Bank Courant* digabung dengan *Bank van Leening*. *Bank Courant* didirikan tanggal 1 September 1752 yang didasari atas rapat para dewan yang diadakan tanggal 2 Juni 1752. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tanggal 5 September 1752 *Bank Courant* digabung dengan *Bank van Leening* dan kemudian menjadi *Bank Courant en Bank van Leening* tidak jauh berbeda jauh dengan Bank van Leening. Bank ini tidak berkembang dengan baik, dan ada kesan didiamkan oleh VOC. Akhirnya. Pada tahun 1790 terungkap adanya kekurangan uang dalam kas bank sebesar 63.000 ringgit, sehingga VOC menilai bahwa hal itu tidak dapat dibiarkan. Maka, melalui keputusan tanggal 5 April 1794, bank dinyatakan ditutup. Korupsilah yang nyata menenggelamkan bank ini. Pada tahun 1799, VOC juga dibubarkan karena mengalami kerugian akibat korupsi. Pada tahun 1824, empat tahun sebelum berdirinya *De Javasche Bank*, berdiri sebuah perusahaan dagang yang bernama *Nederlandsche*

¹⁶ Vincent Houbent, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 183-1870*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2012), hlm.663.

¹⁷ Ririn Darini, "Bisnis Peminjaman Uang Informal di Pedesaan Jawa Dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial", Jurnal, *Informasi* no 1 th XXXIII 2017, hlm.62.

Handel-Maatschappij (NHM). Perusahaan ini dibangun dengan modal yang ukurannya sangat besar pada saat itu, yaitu f 37 juta.¹⁸ Dengan modal sebesar itu NHM juga bertindak sebagai bank, terutama untuk membiayai investasi di bidang perkebunan besar. Meskipun begitu, kebutuhan masih sangat dirasakan kurang, terutama kebutuhan akan lembaga perbankan murni, juga untuk keperluan sirkulasi uang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan lembaga perbankan Hindia Belanda, Raja Willem I, tanggal 29 Desember 1826, mengeluarkan surat perintah yang isinya adalah persiapan pendirian sebuah lembaga perbankan di Hindia Belanda, yang kemudian di beri nama *De Javasche Bank*. Konsepsi tentang perbankan ini ditandatangani oleh J.C. Baud, Direktur Daerah Jajahan dan Schimmelpennick, Direktur Urusan Hindia Belanda dari *Nederlansche Handel-Maatschappij* (NHM). Usulan Raja Willem I yang pada saat itu memerintah di Kerajaan Belanda adalah agar di Jawa didirikan sebuah bank yang mempunyai wewenang dalam mencetak uang dan mengatur sirkulasinya. Pendirian lembaga perbankan ini dilakukan karena kebutuhan di Kerajaan Belanda, pemerintah Hindia Belanda dan juga pedagang-pedagang di Hindia Belanda dalam menjalankan roda perekonomiannya serta untuk mengisi kas kerajaan dan mengisi kekurangan persediaan mata uang yang beredar. Usulan dari Raja Willem I ini juga tidak lepas dari fakta yang ada, yaitu Belanda baru selesai berperang dan kehilangan Belgia yang merupakan salah satu wilayah sumber pendapatan bagi kerajaan dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Disamping itu Belanda juga benar-benar mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan sedang berperang dengan Kaum Padri di Pantai Barat Sumatera dan juga dengan Pangeran Diponegoro, tahun 1825-1830 di wilayah-wilayah Jawa Tengah. Kehilangan wilayah yang menjadi penyokong kegiatan perekonomian di Belanda dan mengalami dua peperangan yang panjang di Hindia Belanda benar-benar menyulitkan perekonomian mereka.

Berbagai perusahaan milik Pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan peminjaman modal usaha. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan Pemerintah Hindia Belanda berencana mendirikan suatu lembaga perbankan untuk mengatasi kesulitan pinjaman uang. Dengan berbagai pertimbangan dan kondisi ini De Javasche Bank didirikan di Hindia Belanda dengan modal yang sangat terbatas yaitu hanya f4 juta.¹⁹ Modal sebesar f

4 juta ini juga tidak serta merta disetor secara utuh dikarenakan kondisi ekonomi yang saat itu sangat sulit. Modal ini berupa saham yang terbagi atas 8000 lembar.

De Javasche Bank merupakan bank swasta pertama yang didirikan di Hindia Belanda pada 24 Januari 1828, yang didasari atas surat perintah dari Raja Willem I bertanggal 29 Desember 1826. Modal awal *De Javasche Bank* jauh lebih kecil dari pada NHM, hanya f 4 juta yang terdiri dari 8000 lembar saham.²⁰ Pembentukan *De Javasche Bank* itu dilakukan oleh Komisaris Jendral Hindia Belanda, Leonard Pierre Joseph Burgraaf Du Bus de Gisiegnyes yang mengeluarkan *octroi* sebagai undang-undang untuk bank tersebut tanggal 11 Desember 1827.²¹ Kebijakan perbankan yang diterapkan oleh *De Javasche Bank* tidak lepas dari hak *octroi*²² yang dimilikinya yang berasal dari Raja Willem I. Meskipun dalam *octroi* tidak disebutkan secara eksplisit bahwa *De Javasche Bank* adalah bank sirkulasi, *octroi* tersebut telah memberikan wewenang bagi *De Javasche Bank* untuk mengeluarkan uang kertas. Dapat dikatakan bahwa, sebelum berkembang menjalankan fungsi bank sentral, *De Javasche Bank* adalah bank komersial yang menjalankan fungsi sirkulasi. Hak *octroi* berlaku dalam kurun waktu sepuluh tahun dan terus diperpanjang serta terus diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial saat itu.

Hingga tahun 1850-an, *De Javasche Bank* masih merupakan satu-satunya lembaga bank yang memberikan kredit kepada pedagang yang terikat kebijakan *culturstelsel*.²³ Pada saat itu, beberapa

²⁰ Pieter Creutzberg dan J.T.M Van Lannen, ed., *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 307.

²¹ Handono Adam Sukhajat, "Dinamika Bank Sentral Indonesia 1946-1968", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Sejarah UNY, 2009), hlm. 31.

²² Hendra Esmara, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Kumpulan Esai Untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm.181. Hak *octroi* adalah pemberian wewenang dan hak tunggal dari pemerintah atau raja dalam waktu tertentu. Di dalam *octroi* diterapkan berbagai aturan *De Javasche Bank* antara lain : aturan pendirian *De Javasche Bank*, aturan tentang permodalan bank, kepengurusan bank, jenis kegiatan bank, dan wewenang bank di Hindia Belanda.

²³ Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya, *Lembaga-LembagaKeuangandanBank*,

¹⁸ Hendra Asmara, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Kumpulan Esai Untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987),, hlm 180.

¹⁹ Erwin Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia* (Jakarta, Komunitas Bambu, 2014), hlm. 16.

perusahaan yang memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan pertanian tidak menggunakan modal sendiri, melainkan sekadar meneruskan kredit yang diperoleh dari *De Javasche Bank*. Meskipun dengan kekuatan modalnya memungkinkan untuk *De Javasche Bank* untuk mempunyai peranan penting dalam perkreditan dalam besar, ditambah dengan hak untuk mengedarkan uang kertasnya sendiri.

2. Berdirinya *Agentschap van De Javasche Bank te Djokdjakarta*.

Gagasan untuk mendirikan kantor cabang Yogyakarta datang dari berbagai pihak termasuk perusahaan-perusahaan Belanda seperti *Firma Dorrepaal & Co* yang pada saat itu mempunyai kepentingan usaha di Yogyakarta. *Firma Dorrepaal & Co* ini diketahui sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar.²⁴ Perusahaan ini mempunyai banyak cabang di berbagai daerah dengan hasil yang sangat besar. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada Mr.N.P van den Ber. Mr.N.P van den Berg adalah President *De Javasche Bank* ketujuh.²⁵ Pada saat Mr.N.P van den Berg ini melakukan perjalanan dinas atau inspeksi ke berbagai kantor cabang di Pulau Jawa maka gagasan mengenai usulan pembukaan kantor cabang Yogyakarta disampaikan.

Gagasan yang disampaikan mengenai hal tersebut kemudian mendapat banyak dukungan terutama dari Pemimpin Cabang Semarang. Pada saat gagasan ini mulai disampaikan diketahui bahwa angka perdagangan di Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dilihat bahwa perkembangan perekonomian Yogyakarta akan memperlihatkan masa depan yang cerah dikemudian hari. Hal ini tidak semata hanya sebuah pendapat saja tetapi dibuktikan dengan jumlah transer ke Yogyakarta melalui cabang Surakarta mencapai f. 2-3,5 juta dan produksi gula daerah sebesar 2.580 ton/tahun.²⁶

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka gagasan yang diajukan mendapat tanggapan yang sangat positif dari President dan anggota Direksi *De Javasche Bank*. Setelah Dewan Komisaris mendapat

Perkembangan, Teori dan Kebijakan Edisi 1, (Yogyakarta: BPFE UGM,1982), hlm 229.

²⁴ Ferry Warjiyo, *Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*, (Bank Indonesia: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral), hlm. 12.

²⁵ Adjie Mulawarman, *Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta*, (Yogyakarta: Bank Indonesia Yogyakarta, TT), hlm. 3.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

penjelasan, Dewan kemudian menyetujui gagasan yang dimaksud dan melalui surat No. 493 tanggal 31 Oktober 1878 disampaikan permohonan pembukaan kantor cabang kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda, yang kemudian mendapat persetujuan Gubernur Jendral dengan melalui surat keputusan No.7 tanggal 20 Desember 1878. Dalam rapat direksi pada tanggal 10 Maret 1879, maka dicapai suatu keputusan untuk membuka Kantor Cabang Yogyakarta setelah Tahun Buku ke-51. Kantor cabang ini diberi nama *Agentschap van De Javasche Bank te Djokdjakarta*.²⁷

Tabel 3
Gaji Pegawai *De Javasche Bank* Yogyakarta

Jabatan	Jumlah	Gaji per Tahun
Pemegang Buku Merangkap Kasir	1	F 7.500
Pemegang Buku Pembantu	1	F 3.600
Kepala Tata Usaha	1	F 2.400
Pegawai Tata Usaha	2	F 1.200
Kasir	2	F 1.200
Penghitung Uang	2	F 360
Mandor	2	F 300
Pesuruh Kantor	2	F 144
Kuli	6	F 120

Sumber: Tim Penulis LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 36.

Para pegawai *De Javasche Bank* cabang Yogyakarta ini didominasi dari kalangan orang Belanda. Pada masa ini sistem nepotisme masih sangat sering dilakukan. Sehingga tidak jarang orang yang bekerja di Bank in tidak terlalu tahu akan perbankan. Pada perkembangan selanjutnya gedung ini akan mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan yang ada. *De Javasche Bank* Cabang Yogyakarta dibuka pada tanggal 1 April 1879 sebagai kantor cabang kedelapan, yaitu setelah kantor cabang Semarang pada 1 Maret 1829, Surabaya pada 14 September 1829, Padang pada 29 Agustus 1864, Makassar 21 Desember 1864, Cirebon pada 21 Juli 1866, Surakarta 21 November 1867 dan Pasuruan pada 27 November 1867 namun cabang Pasuruan ini kemudian ditutup pada 31 maret Meskipun terdapat orang pribumi namun hanya dari kalangan tertentu yang dekat dengan orang Belanda. Posisi pribumi ini juga hanya sebagai pekerja kelas bawah saja tidak

²⁷ Erwin Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 36-37.

seperti orang Belanda. Pada jabatan tertentu orang golongan Timur Asing juga bisa menempati posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang pribumi. Masyarakat dari golongan pribumi hanya akan menduduki posisi sebagai pesuruh atau bahkan kuli. Pekerjaan yang jauh berbeda dengan orang Belanda yang akan menduduki jabatan penting. Hal ini memang telah diberlakukan pihak Pemerintah Kolonial Belanda bukan tanpa maksud dan tujuan lain, melainkan untuk tetap menjaga dan memakmurkan golongan mereka dibandingkan dengan masyarakat pribui ataupun Timu Asing.

3. Perkembangan *Agentschap van De Javasche Bank te Djokdjakarta*

Setelah berdiri dan mulai beroperasi *De Javasche Bank* cabang Yogyakarta ini kemudian melakukan berbagai tugas dan perannya sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang telah tertuang dalam *octroi*.²⁸ Tugas utama *De Javasche Bank* kantor cabang ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan kantor pusat *De Javasche Bank* yang berada di Batavia. Kantor cabang harus menyetorkan bukti laporan secara berkala kepada kantor pusat di Batavia. Laporan pembukuan ini harus disetorkan setiap tahunnya yang disusun dalam catatan pembukuan *De Javasche Bank*.

Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta selaku kantor cabang *De Javasche Bank* juga mempunyai ketentuan selayaknya *octrooi* yaitu mengeluarkan uang kertas untuk memperlancar arus ekonomi di wilayah operasionalnya. Pada saat ekonomi uang berusaha diterapkan oleh pihak kolonial Yogyakarta merupakan wilayah yang masyarakatnya belum secara penuh menggunakan uang dalam kehidupan ekonominya, ekonomi pasar masih didominasi akan sistem barter. Kemudian dengan merebaknya sewa tanah dan terjadi buru secara upah uang dikenal dan menjadi kebutuhan wajib. *Agentschap* mengedarkan uangnya melalui berbagai perusahaan yang melakukan pinjaman dana di lembaganya yang kemudian perusahaan akan menggunakan uang bank untuk biaya operasionalnya termasuk dalam hal upah kerja buruh.²⁹

Perekonomian Yogyakarta sudah bergeser dengan semakin banyaknya praktek sewa tanah yang mengundang pihak asing untuk melakuka sewa tanah dan membuka perkebunan swasta. Politik ekonomi juga telah banyak berubah. Banyak perusahaan swasta yang mempekerjakan rakyat untuk hal perkebunan. Dari perkebunan ini kemudian uang didapat oleh para buruh ini dan uang kemudian menjadi hal yang semakin menjadi kewajiban pada masyarakat di Yogyakarta. Dengan lahirnya cabang *De Javasche Bank* di Yogyakarta kemudian para pengusaha dan

perusahaan asing di Yogyakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Setelah berdiri dan mulai beroperasi *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* kemudian melakukan berbagai tugas dan perannya sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang telah tertuang dalam *octroi*.

Tugas utama *De Javasche Bank* kantor cabang ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan kantor pusat *De Javasche Bank* yang berada di Batavia. Kantor cabang harus menyetorkan bukti laporan secara berkala kepada kantor pusat di Batavia. Laporan pembukuan ini harus disetorkan setiap tahunnya yang disusun dalam catatan pembukuan *De Javasche Bank*. Tugas utama dari *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* antara lain:

- 1) Mengeluarkan uang kertas. Menawarkan kepada masyarakat pelayanan dalam pengiriman uang, pembukaan rekening giro, menerima deposito berjangka, dan semacamnya;
- 2) Melakukan negosiasi dalam wesel luar negeri, memperdagangkan logam mulia dan alat-alat pembayaran luar negeri;
- 3) Memberikan kredit kepada perusahaan dan perorangan, melakukan diskonto terhadap wesel-wesel luar negeri, memberikan pinjaman dan uang muka dengan jaminan surat-surat berharga atau barang-barang dagangan;
- 4) Bertindak sebagai kasir pemerintah dan memberikan uang muka jangka panjang pendek kepada pemerintah Hindia Belanda, dan;
- 5) Menyelenggarakan kliring di antara bank-bank.

Selain berbagai aturan yang sama dengan *De Javasche Bank* pusat di Batavia kebijakan kantor cabang juga sama dengan kantor pusat yang tidak memperbolehkan *De Javasche Bank* untuk melakukan penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan, memberikan kredit tanpa agunan yang mencukupi serta menjual dan membeli saham-sahamnya sendiri. *Agentschap van De Javasche Bank te Djokdjakarta* ini merupakan cabang kedelapan dari *De Javasche Bank*. *Octroi* ini masih terus menjadi undang-undang pokok bagi keberlangsungan *De Javasche Bank* hingga tahun 1922.

Berbagai pinjaman kredit kemudian diberikan kepada berbagai perusahaan swasta. Pihak terbesar yang mempunyai pengaruh dan banyak simpanan maupun kredit di *De Javasche Bank* adalah Firma Dorrepal & Co. Perusahaan ini bergerak pada bidang perkebunan dan termasuk perusahaan terbesar di Hindia Belanda hingga ia mempunyai pengaruh yang besar. Berbagai pinjaman berupa kredit ini dituangkan dalam surat obligasi yang mempunyai aturan kredit berjangka pada setiap peminjamnya. Pada setiap kredit yang diberikan memiliki aturan yang sama dengan kewajiban untuk membayarkan angsuran pada bulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada setiap tahunnya. Untuk taksiran pinjaman yang diberikan kepada pihak pengusaha

²⁸ Erwin Kusuma, *op.cit.*, hlm. 19.

²⁹ *De Javasche Bank, Verslag Over Het Bookjaar 1936-1937.* (Sa Batavia, 1937), hlm. 12.

atau asosiasi perusahaan tertentu mendapat suatu peraturan dengan ketentuan setiap aset perusahaan harus dilaporkan kepada dua anggota *De Javasche Bank* yang bersangkutan untuk ditaksir dan dipertimbangkan nilainya. Kemudian perusahaan atau pemohon dana pinjaman akan mendapatkan sebuah kupon atau surat obligasi dari pihak bank yang kupon atau surat obligasi tersebut kemudian dapat ditukarkan pada pihak *De Javasche Bank* pada bulan tertentu setelah penarikan yang pertama dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di awal perjanjian.

Penebusan surat berharga dilakukan di kantor *De Javasche Bank* pusat atau bisa dilakukan di *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*. Pada saat penebusan ini akan dicantumkan angka yang telah disepakati antara pihak kreditur dari obligasi yang telah diterbitkan dan belum terbayarkan. Obligasi akan dibebani sebuah bunga yang bunga tersebut akan mendapatkan masa jatuh tempo pada waktu tertentu. Apabila bunga tidak ditebus atau ditukarkan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak peminjam dan bank maka bunga akan dibebankan di akhir kepada pihak peminjam. Dengan kemudahan kredit modal yang diberikan banyak perusahaan asing tumbuh dan berkembang di Yogyakarta hal ini yang telah dimulai sejak sistem sewa tanah muncul.

Sistem ekonomi di Yogyakarta mengalami banyak perubahan bagi beberapa kalangan dengan meningkatnya praktek sewa tanah yang mengundang pihak asing untuk melakukan sewa tanah dan membuka perkebunan swasta.³⁰ Politik ekonomi juga telah banyak berubah. Banyak perusahaan swasta yang mempekerjakan rakyat untuk perkebunan. Dari perkebunan ini kemudian uang didapat oleh para buruh ini dan uang kemudian menjadi hal yang semakin menjadi kewajiban pada masyarakat di Yogyakarta. Dengan lahirnya *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* para pengusaha dan perusahaan asing di Yogyakarta semakin berkembang dengan pesat.

Berkembangnya perusahaan asing di Yogyakarta dibarengi dengan banyak tumbuhnya perkebunan sebagai usaha yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha asing. Salah satu perusahaan yang sangat berkembang pesat salah satunya adalah pabrik gula dikarenakan tebu yang dihasilkan perkebunan juga mengalami kondisi yang sangat baik, oleh sebab itu produksi gula tinggi. Bahkan tercatat di Yogyakarta pada tahun ini memiliki 19 pabrik gula antara lain; Pabrik Gula Medari, Beran, Cebongan, Sewugalur, Gesikan, Bantul, Gondanglipuro, Barongan, Padokan,

Sendangpitu, Kedaton Pleret, Pundong, Kalasan, Randugunting, dan Wonocatur.³¹ Tingginya produksi gula di Yogyakarta ini kemudian menjadi salah satu faktor pertimbangan lain untuk pendirian *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*.

Selayaknya fungsi bank sirkulasi *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* menjalankan kredit dan permodalan namun disisi lain dengan ketetapan *octroi* yang diberikan maka *De Javasche Bank* memiliki kewenangan untuk mencetak uangnya sendiri. Pencetakan uang kertas yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* ini tertuang dalam *octroi* kedelapan. Disebutkan dalam *octroi* kedelapan bahwa “ Bank dapat mengeluarkan uang kertas bank sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai tidak lebih rendah dari 5 gulden”. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dan peranan *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* sebagai otoritas pengedar uang di Yogyakarta.

Sebagai cabang dari *De Javasche Bank* di Batavia maka *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* juga menyelenggarakan kliringnya setelah *De Javasche Bank* Batavia.. Kliring ini adalah salah satu cara penghitungan warkat yang diselenggarakan oleh suatu perbankan untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Warkat atau pembayaran yang diperhitungkan antara lain adalah cek bilyet atau giro, wesel bank, maupun bukti transfer. Penyelenggaraan kliring ini telah dilakukan oleh *De Javasche Bank* pusat di Batavia pada 15 Februari 1909. Kliring itu diikuti oleh beberapa perusahaan dan bank asing anantara lain: *Nederlandsche Handel Maatschappij, Factorij Batavia, Chartered Bank of India, Australia dan China, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Nederlandsh Indische Handelsbank*, dan *De Javasche Bank* itu sendiri.

Kemunculan *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* kemudian menumbuhkan perkreditan desa yang pada tahun 1904 muncul Bank Desa.³² Kemunculan Bank Desa ini adalah cara pemerintah Kolonial untuk menarik uang masyarakat. Bank Desa yang muncul pada tahun 1904 ini juga harus melapor dan diawasi oleh *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* sebagai wakil dari *De Javasche Bank* pusat yang berada di Batavia. Pada saat berdirinya *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* mengucurkan dana sekitar fl 495.951,03 untuk keperluan kredit. Dana itu tidak

³¹ Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 213.

³² Arif Akhyat, Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat Di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015), hlm. 254.

³⁰ Dawam Raharjo dkk, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 10.

sepenuhnya untuk penyaluran kredit, tetapi juga cadangan dana. Pada 1933 banyak bank kemudian muncul di Yogyakarta. Sebanyak 147 Bank Desa dan 147 Lumbung desa tersebar di 149 desa di berbagai wilayah Yogyakarta namun tetap dalam pengawasan *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*.

C. DAMPAK *AGENTSCHAP VAN DE JAVASCHE BANK TE DJOKDJAKARTA 1880-1940*.

1. Dampak Sosial

Yogyakarta adalah daerah *Vorstenlanden* yang artinya seluruh kegiatannya dibawah pengawasan langsung dari Negeri Belanda dan juga sebagai satu wilayah yang mempunyai kedaulatannya sendiri. Semakin lamanya Belanda berkuasa di wilayah Hindia Belanda pacsas kebangkrutan dari VOC kekuasaan Belanda bahkan merambah dalam masalah internal dua kerajaan yang masuk dalam wilayah *Vorstenlanden* yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kekuasaan politik ini dapat dilihat misal saja pengaturan mengenai pengangkatan raja yang terjadi di Yogyakarta semenjak Sultan Hamengku Buwono III ketika menggantikan ayahnya. Tidak hanya sebatas itu, Belanda juga menempatkan seorang residen untuk mengawasi kehidupan politik kerajaan dan membatasi kekuatan militer kerajaan.³³ Dengan berbagai kebijakan tersebut, secara tidak langsung Belanda menganggap dua kerajaan itu merupakan negara bagian dalam wilayah kedaulatan Hindia Belanda.

Dengan adanya kepentingan politik di Yogyakarta maka pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah di daerah Yogyakarta. Perencanaan dan pengembangan wilayah kota ini tentu saja dengan satu tujuan politik dari Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan semakin kuatnya pengaruh Belanda di Yogyakarta akan memiliki dampak pada perencanaan dan pengembangan wilayah kota Yogyakarta. Wilayah permukiman awal orang-orang Belanda terletak di daerah sebelah utara Keraton Yogyakarta yang dulu dikenal sebagai Loji Kecil, yaitu suatu kawasan di sekitar Ford Rustenburg yang sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Vredeburg.³⁴ Kemudian, untuk rumah tinggal residen dibangun *Residentiehuis* pada tahun 1824 yang sekarang tempat itu menjadi Gedung Agung

Yogyakarta adalah daerah *Vorstenlanden* yang artinya seluruh kegiatannya dibawah pengawasan langsung dari Negeri Belanda dan juga sebagai satu wilayah yang mempunyai kedaulatannya sendiri. Semakin lamanya Belanda berkuasa di

wilayah Hindia Belanda pacsas kebangkrutan dari VOC kekuasaan Belanda bahkan merambah dalam masalah internal dua kerajaan yang masuk dalam wilayah *Vorstenlanden* yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kekuasaan politik ini dapat dilihat misal saja pengaturan mengenai pengangkatan raja yang terjadi di Yogyakarta semenjak Sultan Hamengku Buwono III ketika menggantikan ayahnya. Tidak hanya sebatas itu, Belanda juga menempatkan seorang residen untuk mengawasi kehidupan politik kerajaan dan membatasi kekuatan militer kerajaan.³⁵ Dengan berbagai kebijakan tersebut, secara tidak langsung Belanda menganggap dua kerajaan itu merupakan negara bagian dalam wilayah kedaulatan Hindia Belanda.

1) Pengembangan wilayah

Dengan adanya kepentingan politik di Yogyakarta maka pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah di daerah Yogyakarta. Berbagai pengembangan wilayah yang terjadi di Yogyakarta membawa dampak yang baik. Perencanaan dan pengembangan wilayah kota ini tentu saja dengan satu tujuan politik dari Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan semakin kuatnya pengaruh Belanda di Yogyakarta akan memiliki dampak pada perencanaan dan pengembangan wilayah kota Yogyakarta. Wilayah permukiman awal orang-orang Belanda terletak di daerah sebelah utara Keraton Yogyakarta yang dulu dikenal sebagai Loji Kecil, yaitu suatu kawasan di sekitar Ford Rustenburg yang sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Vredeburg.³⁶ Kemudian, untuk rumah tinggal residen dibangun *Residentiehuis* pada tahun 1824 yang sekarang tempat itu menjadi Gedung Agung

Seiring dengan bertambahnya jumlah orang Belanda yang menetap di Yogyakarta, kemudian dibangunlah berbagai sarana perkantoran untuk memenuhi kebutuhan warganya yang berlokasi di sepanjang Ngabean dan *Kampamensstraat*. Dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi Yogyakarta yang semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang sangat baik kemudian dibangun pula cabang dari *De Javasche Bank* atas usulan dari salah satu perusahaan perkebunan yang mempunyai cabangnya di Yogyakarta.³⁷ Usulan ini kemudian

³⁵ Vincent J.H Houben, *Keraton dan Kompeni*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002), hlm. 391.

³⁶ Abdurachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008), hlm.21.

³⁷ Ferri Warjiyo, *Sejarah Dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*,

³³ Vincent Houben, *op.cit*, hlm. 391.

³⁴ Abdurachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008), hlm.21.

segera mendapat pertimbangan dari Dewan Direksi *De Javasche Bank* yang pada waktu itu melakukan perjalanan dinas untuk meninjau kondisi Jawa dan dilihat bahwa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki masa depan perekonomian yang sangat bagus.

2. Dampak Politik

1) Kerja sama politik yang semakin kuat pengusaha asing dan Pemerintah Kolonial.

Pendirian *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan perusahaan dan perkebunan swasta milik Belanda di Yogyakarta kemunculan berbagai bank kredit pedesaan yang dananya juga merupakan dari *De Javasche Bank* juga sebetulnya hanya merupakan suatu siasat politik Belanda untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat pedesaan. Dibangunnya berbagai fasilitas pendukung di Yogyakarta juga merupakan politik Belanda guna memudahkan usaha mereka semata dan bukan untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta.

2) Meredupkan wibawa Sultan dan Keraton.

Dibangunnya berbagai bangunan megah di Pusat Yogyakarta juga bertujuan lain untuk meredupkan wibawa keraton Yogyakarta pada saat itu. *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* ini juga membawa banyak keuntungan bagi pemerintah Belanda maupun berbagai pihak perusahaan swasta yang berada di Yogyakarta hal ini dikarenakan pengiriman uang tidak lagi harus jauh melalui cabang *De Javasche Bank* Surakarta.³⁸ Dengan adanya *Agentschap Van De Javasche bank te Djokdjakta* ini pula berbagai perusahaan dan pengusaha Yogyakarta dapat dengan mudah mencari dan mendapat kredit atas perusahaan dan usaha perkebunan yang mereka jalani. Hal ini menjadi suatu posisi yang saling menguntungkan antara dua belah pihak dimana para pengusaha dan perusahaan asing dimudahkan dalam mengurus permodalan dan perkreditan sementara di sisi lain pihak kolonial mendapat banyak keuntungan dengan semakin banyak pula uang yang mereka dapat dari *De Javasche Bank*. *Agentschap Van De Javasche Bank* ini juga tidak hanya melakukan kerjasama dengan perusahaan dan penguasa asing saja tetapi juga dengan berbagai penguasa daerah setempat dan juga *Agentschap Van De Javasche Bank* ini dengan perkembangan dan kemajuannya yang pesat kemudian muncul berbagai bank milik asing dan

mulai banyak bermunculan kredit pedesaan yang tentu saja diawasi oleh *De Javasche Bank*.

3) Semakin berkuasanya Pemerintah Kolonial di Yogyakarta.

Dengan berbagai perusahaan yang semakin tumbuh dan menggunakan jasa *Agentschap Van De Javasche Bank te Djodjakarta* kekuasaan Pemerintah Kolonial di Yogyakarta tidak diragukan lagi. Berbagai perusahaan milik swasta Belanda semakin tumbuh besar dan mempekerjakan banyak buruh pribumi Yogyakarta. Masyarakat semakin bergantung akan usaha milik swasta sebagai buruh. Disisi lain pihak Pemerintah Kolonial semakin gencar melakukan berbagai pembangunan fasilitas untuk mempermudah usahanya di Yogyakarta. Banyak pula orang-orang Belanda yang kemudian berada di Yogyakarta dan menduduki posisi sebagai pegawai dengan jabatan yang tinggi di wilayah Yogyakarta. penguasa daerah setempat dan juga *Agentschap Van De Javasche Bank* ini dengan perkembangan dan kemajuannya yang pesat kemudian muncul berbagai bank milik asing dan mulai banyak bermunculan kredit pedesaan yang tentu saja diawasi oleh *De Javasche Bank*.

3. Dampak Ekonomi

1) Semakin banyak bermunculan perusahaan asing milik Belanda.

Berdirinya *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* membawa angin segar terhadap geliat ekonomi Yogyakarta. Hal ini merujuk pada semakin banyaknya bermunculan perusahaan asing tidak hanya dalam bidang perkebunan saja melainkan berbagai jenis perusahaan lain mulai bermunculan dan berkembang. Hal ini dikarenakan *De Javasche Bank* selain sebagai kasir Pemerintah Belanda juga melakukan tugas sebagai bank penyedia jasa kredit terhadap berbagai perusahaan swasta milik Belanda. Karena berbagai kemudahan dalam segi permodalan ini maka mulai banyak bermunculan cabang usaha milik orang Belanda di Yogyakarta. Kondisi ini juga tidak lepas dari berdirinya *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*, Yogyakarta dianggap sebagai suatu wilayah yang memenuhi syarat lengkap mendirikan cabang usahanya.³⁹ Pada saat itu setoran melalui *Agentschap De Javasche Bank te Djokdjakarta* terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kemajuan ekonomi untuk para pengusaha asing dan bukan berarti kemajuan untuk tingkat ekonomi masyarakat pribumi. *Agentschap De Javasche Bank te Djokdjakarta* pada kenyataannya tidak memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat pribumi.

(Jakarta: Bank Indonesia Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2014), hlm. 22.

³⁸ Ferry Warjiyo, *op.cit.*, hlm. 16.

³⁹ Djojohadikoesoemo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 33.

2) Beralihnya kehidupan ekonomi masyarakat menjadi Ekonomi Uang.

Pada awalnya Kehidupan ekonomi masyarakat yang belum mengenal uang kemudian sedikit demi sedikit berubah dengan banyaknya aturan baru dimana uang mulai mencari celah dan tempat dalam ekonomi masyarakat. Banyak pengusaha asing mulai menerapkan buruh upah untuk lahan perkebunannya. Sedikit demi sedikit uang mulai dikenal dan beredar di masyarakat. Hal ini dipercepat dengan kemajuan perusahaan perkebunan yang sangat mudah untuk mendapat pinjaman modal diakibatkan berdirinya *Agentchap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*. Pengusaha dan perusahaan asing tidak perlu pula untuk jauh mendistribusikan atau mengirim uangnya melalui Cabang *De Javasche Bank* di Surakarta karena di Yogyakarta sudah ada.⁴⁰ Semakin berkembang perusahaan maka semakin banyak pula buruh yang dipekerjakan, semakin cepat pula peredaran uang di masyarakat. Meskipun uang dikenal dan banyak digunakan namun tetap saja kondisi ekonomi masyarakat pribumi masih saja bertahan pada kondisi yang semula dikarenakan mereka juga terbebani dengan berbagai pajak yang diterapkan pihak Pemerintah Kolonial. Pasar yang semula menggunakan metode barter kemudian berubah menjadi menggunakan uang sebagai pembayarannya dikarenakan tuntutan keadaan bahwa uang telah dikenal dan sebagai ganti atas suatu barang.

3) Bermunculan Kredit Rakyat dengan dana *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*.

Peredaran uang menjadi sangat banyak dan cepat di masyarakat karena kemudian banyak aturan baru dalam masyarakat yang mengharuskan penggunaan uang seperti membayar pajak yang pertama hanya berupa hasil bumi kemudian menjadi menggunakan uang. Pola ekonomi dalam masyarakat juga mulai berubah dari ekonomi sederhana berubah menjadi ekonomi liberal dengan digunakannya uang dalam kehidupan mereka. Pendirian *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta* membawa banyak dampak terhadap ekonomi desa dalam hal ini adalah sektor perkreditan dan pertanian dimana pada tahun 1917 berdiri suatu Bank Desa yang bertugas memberikan pinjaman kredit kepada para petani dibawah pengawasan *Agentschap Van De Javasche Bank te Djokdjakarta*.⁴¹

D. KESIMPULAN

Pendirian *Agentschap Van De Javasche Bank Te Djokdjakarta* memberikan banyak pengaruh

secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat di Yogyakarta. Pasalnya Yogyakarta sebelum didirikannya *De Javasche Bank* dan terpengaruh dari adanya sistem sewa tanah adalah sebuah wilayah kerajaan dengan pola ekonomi sederhana dan sistem kekuasaan feodal yang sangat kental. Lalu lintas ekonomi masih didominasi akan sistem ekonomi sederhana dimana uang belum mempunyai peranan yang berarti. Dengan mulai diperkenalkannya sistem sewa tanah sedikit demi sedikit mata uang mulai dikenal dan dipergunakan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Para pihak penyewa tanah ini akan menyewa tanah tanah lungguh dari para penguasa tanah. Kondisi Yogyakarta yang subur dan sebagai faktor geografis yang sangat mendukung kemudian menjadikan Yogyakarta sebagai suatu wilayah yang cocok untuk menjadi sasaran sewa tanah para pengusaha asing. Yogyakarta sebagai wilayah *Vorstenlanden* juga memiliki tarif sewa tanah yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Surakarta.

Dengan semakin meningkatnya praktek sewa tanah di Yogyakarta berbagai fasilitas pendukung akhirnya dibangun oleh pihak Pemerintah Kolonial Belanda atas berbagai pertimbangan guna memperlancar usaha mereka. Untuk memperlancar usahanya dibangunlah jalur kereta api yang akan menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta pada 1872. Dengan dibangunnya jalur kereta api ini praktek sewa tanah di Yogyakarta semakin meningkat begitu juga dengan harga sewa tanah di Yogyakarta jauh lebih tinggi jika di bandingkan dengan Surakarta.

Saat mulai berakhirnya *octroi* kedelapan cabang kedelapan *De Javasche Bank* dibuka di Yogyakarta pada 1 April 1879. Dengan dibukanya lembaga yang akan mengurus dan memberikan kredit bagi para pengusaha swasta milik Belanda ini keadaan Yogyakarta semakin dipenuhi dengan berbagai perusahaan dan perkebunan milik swasta yang tanahnya berstatus sewa. Makin maraknya perusahaan maka memperbanyak jumlah buruh upah yang dipekerjakan, uang menjadi suatu kebutuhan dan kewajiban untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Monetisasi terjadi di Yogyakarta dengan sangat cepat. Uang tidak hanya beredar melalui upah yang didapat sebagai buruh.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arsip Nasional Republik Indonesia “ *Boukundig Bereau Sisten en Louzada Gevestigd te Djokjarta 5 Februari 1920*”, no 99.

Abdullah Ali, *Liku-Liku Sejarah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia , 1995.

⁴⁰ Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 107.

⁴¹ Djojohadikoesoemo, *op.cit*, hlm. 37.

- Adjie Mulawarman Hasan, *Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta*, Yogyakarta: Bank Indonesia Yogyakarta, TT.
- Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Creutberg P and J.T.M Van lannen, *Changging Economic in Indonesia: Money and Banking 1816-1940*, The Hague: Martinus Nijhoof, 1980.
- Dawam Raharjo dkk, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- De Javasche Bank, *Verslag Over Het Boekjaar 1936-1937*, Sa Batavia, TT, 1937.
- Depdikbud, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1977), hlm. 31.
- Djojohadikoesoemo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia Fragmen Sejarah Bank Sentral Di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2014.
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah: Historical Explanition*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Prees, 1984.
- Margana S, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Murbyanto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Purnawan Basundoro, *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota di Indonesia*, Yogyakarta : Indonesia Acros Olders , 2010.
- Pieter Creutzberg dan J.T.M Van Lannen, ed., *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 307.
- Ririn Darini, "Bisnis Peminjaman Uang Informal di Pedesaan Jawa Dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial", Jurnal, *Informasi* no 1 th XXXIII 2007.
- Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003),. hlm. 303-305.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Sirashi Takashi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa*, Jakarta: Grafiti, 1912.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : UGM Press, 1984),. hlm. 14.
- Soetatwo Hadiwiegeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Tim penulis LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: PT Pusataka LP3ES Indonesia, 1995.
- VincentJ.H Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2012.

Skripsi

Arif Akhyat, *Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990*, Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sejarah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Ia Solihah, " Bank Indonesia Tahun 1968 – 1991", Fakultas Ilmu Budaya, Skripsi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

Handono Adam Sukhajat, "Dinamika Bank Sentral di Indonesia 1946-1968", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015

